

DINAMIKA POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA: PERGULATAN POLITIK ICMI MEMBANGUN DEMOKRASI DI ERA ORDE BARU

Taufikurrahman

Mahasiswa Magister Sosiologi UGM Yogyakarta
Email: taufikgaoza@mail.ugm.ac.id

Wahyu Hidayat

Mahasiswa Magister Sosiologi UNS
Email: wahyuhidayat@student.uns.ac.id

Abstract

The political development of a country is determined by the system in force. Indonesia under a new order, for example, ruled by political system with authoritarian. In the new order era, the middle class Muslims did not gain flexibility in expressing their political participation as the impact of intervention and power domination. The changing in the political dynamics occurred in Indonesia in mid 1990s, one of which was characterized by the development of the Indonesian Muslim Scholars Association (ICMI). The emergence of ICMI is considered as the estuary of the long history struggle of the middle class Muslims in Indonesia. ICMI symbolizes the symbiotic relationship between religion and the state, the accommodating relationship between Islam and democracy. The revival of political roles of the middle-class Muslims requires significant changing within the political system, from the authoritarian to democracy.

This research employs qualitative research methods with the approach of literature studies (library research) and a descriptive analysis method using especially the Hegemony theory of Anthonio Gramsci. The research aims to describe ICMI's socio-political role in the New Order era. It is found in this study that among the ICMI's agenda is to develop a comprehensive-built democracy. Democracy is expected to be able to create changes not only in the political field but also in some other areas, including social, economic, cultural and religious. The democratization strategy pursued by ICMI through vertical mobility to establish a more balanced power relationship by taking part in the pendulum of power through the placement of Muslim scholars in the system of government cabinet as well as the ruling party, Golkar. At this point, ICMI

plays a significant role as a group of intellectual counter hegemonic. This has resulted in a form non-confrontation relationship between Muslims and the government. Furthermore, ICMI developed the empowerment agenda in order to improve the quality of life of the community as reflected by the objective of ICMI, symbolised by the five 'K' (English: five Q) of ICMI; Quality of life, quality of faith, quality thought/technology, quality of work, and quality of work invention. The agenda was implemented through the chains and linkages of ICMI throughout the country, such as CIDES, the Waqf book Movement, the Perpetual Charity Foundation Orbit Scholarship, MASIKA Study Group, and the publication of *Republika* newspaper.

Keywords: Muslim Middle Class; Democratization; ICMI; New Order Era

Abstrak

Perkembangan politik pada suatu negara sangat ditentukan oleh sistem politik yang diberlakukan. Indonesia dibawah orde baru, dikuasai oleh suatu sistem politik yang bercorak otoriter dan oligarkis. Kelas menengah muslim tidak mendapatkan keleluasaan dalam mengembangkan partisipasi politik sebagai dampak dari adanya intervensi dan dominasi kekuasaan. Perubahan dinamika politik terjadi pada paruh 1990, salah satunya ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kelahiran ICMI adalah muara dari tapakan panjang sejarah perjuangan kelas menengah muslim di Indonesia. ICMI melambangkan hubungan simbiotis antara agama dan negara, hubungan akomodatif antara Islam dan demokrasi. Kebangkitan peran politik kelas menengah muslim mensyaratkan terjadinya perubahan sistem politik dari yang otoriter menuju demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research). Analisis yang dikembangkan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran sosial politik ICMI di era orde baru. Ulasan mengenai tujuan tersebut dikaji secara lebih mendalam menggunakan teori Hegemoni Anthonio Gramsci. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ICMI menginginkan terbangunnya suatu tatanan demokrasi yang komprehensif. Demokrasi yang diharapkan mampu menciptakan perubahan tidak saja pada bidang politik namun juga pada bidang-bidang yang lain; sosial, ekonomi, budaya dan agama. Strategi demokratisasi yang ditempuh ICMI melalui mobilitas vertikal guna membangun relasi kuasa yang lebih berimbang dengan mengambil bagian dalam pendulum kekuasaan melalui penempatan tokoh-tokoh cendekiawan muslim dalam kabinet pemerintahan juga partai penguasa; Golkar. Pada titik ini, ICMI memainkan peranan sebagai kelompok intellectual countre hegemonic. Implikasinya, terbangunnya hubungan yang tidak konfrontatif antara umat Islam dengan pemerintah. Selanjutnya, ICMI mengembangkan agenda-agenda pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat

sebagaimana yang tercermin dari tujuan ICMI yang disimbolisasi dengan Lima “K”; Kualitas Iman, Kualitas Fikir, Kualitas Karya, Kualitas Kerja dan Kualitas Hidup. Agenda-agenda tersebut direalisasi melalui departemen-departemen organisasi maupun badan-badan otonom yang didirikan seperti CIDES, Gerakan Wakaf Buku, Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orbit, Kelompok Studi MASIKA, hingga penerbitan Koran Republika. Sebagai bagian dari eksponen bangsa dan umat, ICMI berada di garda depan dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat, egaliter dan emansipatif-partisipatoris di Indonesia.

Kata Kunci: Kelas Menengah Muslim; Demokratisasi; ICMI; Orde Baru

I. Pendahuluan

Kemunculan kelas menengah di Indonesia tak dapat dilepaskan dari proses transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru pada dekade 1966. Dengan didukung oleh kekuatan ABRI dan semangat teknokratisme, Orde Baru berhasil mengkonsolidasikan dirinya dengan melakukan upaya re-orientasi dan menata ulang struktur politik Indonesia (Abdullah, 1999, dalam Rahardjo, 1999: XV; Mas’oed, 1989: 23). Hal tersebut merupakan dampak dari distabilitas politik dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh konflik ideopolitik yang melibatkan ABRI dan PKI.

Pemerintah Orde Baru menempuh jalan *pembangunan* dan *modernisasi*. Diatas fondasi ideologi pembangunan dan modernisasi, Orde Baru mensyaratkan adanya kebijakan dan kebijaksanaan pemerintahan yang rasional, efisien, efektif dan pragmatis. Sejak 1980-an, dampak dari pembangunan (kemakmuran) ekonomi membuat Indonesia memiliki sejumlah besar tenaga ahli (*skilled man-power*) yang terdiri dari para maneger, para pekerja terlatih, para teknisi, para guru dan dosen yang berdedikasi tinggi, dan jenis-jenis Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya yang cukup kualified (Anwar, 1995: 120). Maka, kehadiran Orde Baru dengan kebijakan ekonomi ‘pintu terbuka’ dapat di pandang sebagai awal kelahiran kelas menengah di Indonesia (Subianto, 1999, dalam Hadijaya, ed, 1999: 21).

Kehadiran kelas menengah membangun kesadaran umum tentang adanya kesamaan pandangan banyak kalangan dalam melihat keberadaan kelas menengah yang kuat memiliki hubungan kausalitas-konstruktif dengan perkembangan demokrasi di sebuah negara. Pertanyaannya, mengapa perkembangan ekonomi dan perpindahan suatu negeri ke tingkat pendapatan menengah ke atas mendorong demokratisasi?

Menurut Samuel P Huntington, perkembangan ekonomi dan industrialisasi mendorong meluasnya kelas menengah. Dengan demikian semakin lama semakin besar proporsi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengusaha, kaum

profesional, pemilik toko kecil, guru, birokrat, manager, teknisi, klerek, dan pekerja di bidang sektor jasa. Tidak aneh kemudian, gerakan-gerakan demokratisasi dalam gelombang ketiga tidak dipimpin oleh kaum tuan tanah, petani, atau buruh industri, melainkan berasal dari kelas menengah perkotaan (Dwipayana, 2001: xv-xvii).

Tonggak penting keterlibatan kelas menengah muslim dalam sejarah demokratisasi politik di Indonesia tercermin dari pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia pada Desember 1990. ICMI, begitu organisasi cendekiawan muslim ini biasa disingkat, merupakan potret dari adanya hubungan simbiotis antara agama dan negara, bukti dari adanya hubungan akomodatif antara Islam dan demokrasi. ICMI adalah muara dari tapakan panjang sejarah perjuangan kelas menengah muslim di Indonesia.

Kelahiran ICMI adalah buah dari pergolakan politik baik yang terjadi didalam negeri maupun pergolakan-pergolakan yang berkembang di dunia internasional. Pergolakan politik yang telah memicu lahirnya kembali semangat revitalisasi dan atau menguatnya kembali peran-peran agama dan etnik dalam bidang politik dan ruang publik disatu sisi, dan menguatnya arus diseminasi ide-ide demokrasi disisi lain (Hefner, 2001: 15).

Kebangkitan peran politik agama misalnya, di beberapa tempat ditandai dengan merebaknya gerakan-gerakan yang menonjolkan identitas keagamaan dan etnikal semisal nasionalisme Hindu di India, kebangkitan etnikal di Amerika, kemenangan partai Islam di Aljazair. Sedangkan arus globalisasi dan diseminasi demokrasi diawali oleh terjadinya pergolakan-pergolakan politik di era 90-an seperti runtuhnya rezim komunisme pada 1989-1990, jatuhnya rezim otoriter di Portugal, Cina, Equador, Bolivia, India, Filipina, Polandia, Indonesia dan lainnya. Euphoria politik yang kemudian oleh Francis Fukuyama dilihat sebagai titik akhir evolusi ideologis umat manusia (*the end of ideology*) dan titik balik dari penyebaran universalisasi nilai-nilai demokrasi liberal Barat sebagai bentuk akhir dari puncak kekuasaan manusia (Juegensmayer, 1998: 23; Huntington, 1997: 23-24; Hefner, 2001: 16).

Diseminasi demokrasi merambah masuk ke banyak negara termasuk Indonesia. Demokrasi menjadi pilihan utama banyak negara sebagai alat menjalankan pemerintahan. Demokrasi yang dikembangkan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Kehadiran kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang terdidik dan mapan dalam memahami dialektika politik menjadi penting dan demokrasi sangat bergantung pada kehadiran kelompok-kelompok tersebut.

Dengan demikian, pembentukan ICMI tidak dapat dianggap sebagai kebetulan sejarah belaka dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Kelahiran ICMI merupakan

respons kaum intelektual (baca: cendekiawan) terhadap situasi sosial-politik-budaya yang berkembang di Indonesia. Situasi sosial-politik tersebut adalah kembali menguatnya gerakan-gerakan bercorak keagamaan dan etnikal yang turut mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia.

Penelitian ini mencoba mengulas peranan politik yang telah diambil dan dijalankan ICMI pada periode 1990-1995. Dalam pandangan penulis, setidaknya terdapat dua alasan mendasar kenapa periode ini penting untuk dikaji. *Pertama*, pada periode ini selain merupakan tahun-tahun awal kelahiran ICMI, juga tahun-tahun akhir kekuasaan Orde Baru. Periode ini adalah periode bersejarah dalam perubahan postur politik di Indonesia, khususnya bila dikaitkan dengan agenda-agenda demokratisasi. ICMI sebagai salah satu representasi kekuatan Islam politik dengan agenda demokratisasi memulai peran sosial politiknya dalam panggung politik di Indonesia. *Kedua*, adanya sistem politik oligarkis-otokratif yang dijalankan pemerintahan Orde Baru menyebabkan agenda demokratisasi menjadi cita-cita politik yang tidak mudah untuk direalisasikan. Tekanan-tekanan yang bersifat *hegemonic* ataupun *koersif* menghantui keberadaan suatu kelompok tertentu (khususnya kelompok Islam) yang secara sikap politik berseberangan dengan pemerintah.

Guna melihat relasi politik antara kelas menengah muslim (ICMI) dengan pemerintah orde baru, penelitian ini menggunakan kerangka teori *Hegemoni* Antonio Gramsci (1891-1937). Secara etimologi, hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut *eugomania*, sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *city-states*) secara individual, misalnya yang dilakukan oleh negara kota Sparta dan Athena terhadap negara-negara lain yang sejajar (Patria dan Arif, 1999: 12).

Konsep hegemoni adalah pembacaan secara komprehensif atas sebuah model kepemimpinan yang meletakkan supremasi kelas sebagai basis fundamentalnya. Bagi Gramsci, kelas sosial akan memperoleh supremasinya melalui dua cara yaitu melalui cara dominasi atau *koersi* (paksaan) dan yang kedua melalui kepemimpinan intelektual dan moral (Patria dan Arif, 1999: 119). Cara yang kedua itulah yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni.

Teori hegemoni memiliki tiga tingkatan, yaitu; hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*) dan hegemoni minimum (Patria dan Arif, 1999: 128). *Pertama*, Hegemoni Integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjuk tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organisasi antara pemerintah dengan yang

diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme baik secara sosial maupun etis.

Kedua, Hegemoni merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan berat. Disana terdapat potensi disintegrasi. Disintegrasi tersebut memberikan arti bahwa meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut *decadent hegemony*.

Ketiga, Hegemoni Minimum. Bentuk hegemoni ini adalah bentuk yang paling rendah dibandingkan dua bentuk hegemoni diatas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elite ekonomis, politis dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganannya terhadap setiap campur tangan massa dalam kehidupan bernegara.

Konsep hegemoni didasarkan pada tiga instrumen; konsesus, *political society* vs *civil society* dan intelektual;

a. Konsesus

Konsensus adalah landasan mekanistik yang melahirkan tindakan hegemonik kelompok elite (Gramsci: *the ruling class*) terhadap kelompok yang lebih rendah. Konsep konsesus selalu dikaitkan dengan ungkapan psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosial-politik maupun aspek-aspek aturan yang lain. Sehingga dalam mekanisme konsesus, Gramsci melihat adanya penyesuaian-penyesuaian sikap yang dapat dijadikan sebagai penyangga konsep konsesus dalam teori hegemoni.

Terdapat tiga kategori penyesuaian yang berbeda. *Pertama*, orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuainya. *Kedua*, orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan tertentu dengan cara-cara tertentu. *Ketiga*, penyesuaian dipengaruhi oleh tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat (Maliki, 2012: 206-207).

b. *Political society* vs *civil society*

Dalam teori Hegemoni, terdapat pemisahan fungsi dan pengertian antara negara (*political society*) dengan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai bentuk identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar kenseptualisasi hegemoni. Terdapat tiga batasan yang dikemukakan oleh Gramsci (Patria dan Arif, 1999: 137); *Pertama*, Ekonomi. Batasan ekonomi merujuk kepada pengertian moda produksi (*mode of production*) yang paling dominan dalam sebuah masyarakat.

Kedua, yaitu Negara, merupakan batas yang berarti tempat munculnya pratek-praktek kekerasan (polisi dan aparat kekerasan lainnya) dan tempat terjadinya pendirian birokrasi negara. *Ketiga*, Masyarakat Sipil. Berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar sistem produksi material dan ekonomi.

c. Intelektual

Intelektual dalam teori hegemoni oleh Gramsci dipandang sebagai kelompok yang bertanggungjawab mengorganisir atau mereorganisir kesadaran maupun ketidaksadaran secara terus menerus dalam kehidupan massa. Terdapat dua kategori intelektual dalam konsep hegemoni; *intelektual hegemonic* dan *intelektual counter hegemonic*. Intelektual *hegemonic* bertanggungjawab menjamin pandangan dunia massa yang konsisten dengan nilai-nilai kapitalisme, sementara intelektual *counter hegemonic* mempunyai tugas memisahkan massa dari kapitalisme dan membangun pandangan dunia sesuai perspektif sosialis (Maliki, 2012: 205).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (*Literary Research*). Sebagai salah satu metode penelitian, pendekatan kualitatif berkembang mengikuti suatu dalil sebagai proses yang tidak pernah berhenti (*unfinished process*). Ia berkembang dari proses pencarian dan penangkapan makna yang diberikan oleh suatu realitas sosial dan fenomena sosial (Singleton Jr, dkk, 2005: 60-61). Sehingga penelitian ini menekankan kajian pada ruang pemaknaan dan proses, bukan hasil dari sebuah aktivitas sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yang dimaksud adalah kegiatan melihat kembali sumber-sumber data yang tersedia yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperluas data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber-sumber data yang bersifat dokumentatif dapat berbentuk buku, jurnal, majalah, ataupun arsip-arsip yang memiliki kaitan dengan subyek yang sedang diteliti.

Sementara wawancara dilakukan bersama tokoh-tokoh yang mengetahui perjalanan ICMI dan pernah aktif sebagai bagian (menjadi pengurus) dari ICMI. Wawancara dilakukan dengan menentukan Informan Kunci yang dapat memberikan keterangan sebagai data tambahan ataupun yang bersifat penjelasan yang dapat menkonfirmasi kebenaran data dokumentatif yang penulis miliki. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan wawancara terhadap tokoh-tokoh ICMI yang pernah aktif

dalam kepengurusan ICMI-baik dalam struktur kepengurusan ICMI Pusat dan ICMI DIY-semasa Era Orde Baru.

Adapun analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode ini dijelaskan sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat tertentu berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pergulatan Politik ICMI di Era Orde Baru

Kehadiran ICMI dalam konstelasi sosial politik di era orde baru menjadi penanda atas munculnya semangat yang terbaharukan khususnya bagi kalangan kelas menengah muslim Indonesia. ICMI hadir sebagai *the creative minority* ditengah cengkraman kebisuan politik umat Islam. Di era orde baru, masyarakat Islam kerap dipersepsikan sebagai *the silent majority*, kerumunan mayoritas yang terdiam, karena tak mampu mengembangkan akselerasi politiknya dihadapan kekuasaan absolut pemerintah. Tentu saja, dengan tidak bermaksud menuduh ICMI sebagai organisasi politik *an sich* yang berorientasi kekuasaan, namun ICMI juga bukanlah organisasi yang *a-politik*. Sehingga peranan yang dimainkan ICMI juga memberikan implikasi nyata bagi perubahan postur perpolitikan di Indonesia.

Mengusung semangat kecendekiawanan, ICMI melakukan upaya mereorganisir semangat dan partisipasi politik masyarakat untuk turut serta terlibat dalam proses pembangunan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat represif telah membentangi jarak antara masyarakat dan negara, sehingga muncul semacam sikap antipati dan phobia masyarakat terhadap pemerintah. Kehendak berlebih pemerintah untuk berkuasa (*the will to power*) telah menjadikan pemerintah sebagai sosok yang *megalomaniac* dimana perbedaan dilihat sebagai ancaman terhadap langgengnya kekuasaan. Kebijakan politik “menghalalkan segala cara” dijalankan pemerintah sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan kekuasaan. Masyarakat tidak mendapatkan ruang untuk terlibat dalam mengontrol arus pembangunan. Dampak langsung dari sistem politik yang otoritatif-oligarkis semacam itu, memicu lahirnya kesenjangan sosial di masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari sukses pembangunanisme yang digelorakan pemerintah Orde Baru tidak berkorespondensi dengan pertumbuhan sosial yang baik di masyarakat.

ICMI lahir dan berkembang dalam setting sosio-politik dengan tatanan yang kontraproduktif; sukses pembangunan disatu sisi dan tingginya kesenjangan sosial disisi lain. Dua situasi sosial-politik yang saling menegasi satu sama lain. Situasi sosial

politik sebagai dampak dari sistem politik yang tengah dikembangkan pemerintah Orde Baru. Maka, kehadiran ICMI sebagai organisasi cendekiawan memiliki orientasi untuk merajut jalinan sosial dalam bingkai *Ukhuwah Islamiyah*, memberdayakan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk mencapai keadaban (*Ukhuwah Insaniyah*) dengan tetap berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sebagai cerminan dari pertalian *Ukhuwah Wathaniah*. Ketiganya dimaksudkan sebagai bagian dari perjuangan demi tercapainya visi dan misi ICMI yang berpuncak pada cita-cita mulia terciptanya tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera lahir dan bathin yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam kapasitasnya sebagai organisasi cendekiawan, ICMI memiliki potensi untuk membangun integrasi politik dan aliansi strategis baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah) maupun yang bersifat horizontal dengan menciptakan kondisi yang gradual di masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial-kultural dan politik. Dengan adanya integrasi semacam itu, akan memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat (umat Islam) khususnya untuk terlibat dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, ICMI sejatinya membantu berlangsungnya proses pendewasaan politik bagi umat dan bangsa.

Spirit kecendekiawanan yang tertanam dalam organisasi ICMI, menjadi dasar dari bangunan sikap yang dikedepankan dalam memberikan respons, khususnya atas sistem politik otoriter dan oligarkis yang dijalankan Orde Baru. Sebagai organisasi yang tidak “buta politik”, secara tidak langsung ICMI mengemban tugas untuk mampu menciptakan iklim keterbukaan dan menopang jalannya demokratisasi. Sebagai bagian dari eksponen bangsa dan umat Islam, ICMI berada di garda depan untuk membangun tatanan demokrasi politik yang sehat, egaliter dan emansipatif-partisipatoris di Indonesia.

1. Realitas Politik ICMI

Pada sebuah kesempatan, Ketua Umum ICMI, Prof. BJ. Habibie menyatakan bahwa ICMI bukan organisasi politik dan tidak berpolitik. Tepatnya, ketika mengumumkan susunan pengurus ICMI pada 13 Februari 1991, Habibie menegaskan;

“ICMI bukanlah organisasi politik dan bukan pula sebagai organisasi massa yang bernaung dibawah partai politik. Tujuan pembentukan ICMI untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas karya serta kualitas berfikir seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam”(Anwar, 1995: 296).

Kalimat yang disampaikan Habibie tersebut harus diletakkan secara proporsional. Kalimat tersebut tidak harus dimaknai secara manifes, apalagi dengan mengedepankan sudut pandang yang sempit dengan membatasi arti kata politik sebatas jabatan kekuasaan. Habibie sebagai *the great person* dalam organisasi ICMI, mencoba membangun rumusan sikap politik dengan bahasa yang penuh kehati-hatian

guna menghindari benturan hegemoni makna kata politik yang sering dikonotasikan negatif, khususnya pada banyak analisis yang diarahkan kepada ICMI.

Politik harus diartikan secara luas, politik bukanlah kata sederhana yang ujung pemaknaannya berhenti pada kata *power* (kekuasaan). Politik memiliki hubungan yang erat dengan *policy* (kebijakan) yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, maka kalimat Habibie tidak harus diartikan sebagai “ICMI tidak boleh berpolitik”. Melainkan “ICMI harus berpolitik” karena keberadaan ICMI berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak, khususnya umat Islam.

Pada tataran tertentu, kaum cendekiawan harus mengambil dan memainkan peranan-peranan politik. Salah satu dari fungsi utama kaum cendekiawan, menurut Edward Shil adalah “memainkan peran politik”, sebab melalui peranan politik seorang cendekiawan mampu terlibat secara nyata dalam persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga tokoh semacam Bung Hatta pun tidak ragu untuk menyebut bahwa politik adalah salah satu bentuk keterlibatan kaum cendekiawan (Anwar, 1995: 297).

Keterlibatan ICMI dalam politik sejatinya telah dimulai dari sejak pendiriannya. Pilihan untuk terlibat dalam “pembangunan nasional” sebagai salah satu tujuan dari ICMI (Lihat Anggaran Dasar ICMI, Bab III, Pasal 5) adalah pilihan yang bersifat politis. Pilihan tersebut menjadi tidak logis bila ICMI tidak menghendaki dirinya untuk berpolitik. Tujuan tersebut tidak akan-atau paling tidak lebih dimungkinkan untuk-bisa direalisasikan bila ICMI menempuh mekanisme politik. Penunjukan Habibie sebagai Ketua Umum ICMI juga merupakan indikasi lain yang memperkuat status sosial ICMI sebagai entitas yang tidak anti terhadap politik.

Yang membedakannya dengan ormas lain adalah pada bentuk dan artikulasi politik yang dijalankan. Saat ormas lain, seperti Fordem misalnya, mengambil sikap untuk menjadi “oposisi murni” terhadap pemerintah, ICMI justru memainkan artikulasi politik yang akomodatif terhadap pemerintah. Implikasi paling signifikan dari sikap politik ICMI tersebut adalah terbangunnya hubungan yang tidak konfrontatif antara umat Islam dengan pemerintah orde baru.

Implikasi lain dari artikulasi politik ICMI adaah memberikan pengaruh nyata bagi kelompok-kelompok kelas menengah yang sholeh dan tekun menjalankan perintah agama, dan membuat birokrat yang semula takut untuk berjamaah Jum`at menjadi bangga melakukannya. Dan menguatnya kepatuhan kepada Islam di kalangan kelas menengah dan pemerintah, menurut Cak Nur, adalah sebuah pencapaian yang sangat berharga (Hefner, 2001: 64).

Mengungkap realitas politik ICMI secara tidak langsung mengantarkan kita untuk lebih memahami realitas politik Islam (baca; politik kelas menengah muslim)

yang berkembang di era orde baru. Corak politik aliran yang melekat sebagai karakter politik kelas menengah muslim telah membonsai gerak politik Islam yang membutuhkan strategi untuk mempercepat dan meningkatkan artikulasi politiknya. Pluralitas sikap sebagai dampak langsung dari corak politik aliran telah memperlambat laju politik kelompok Islam dalam menciptakan iklim politik yang revolusif dan demokratis di era orde baru. Kelas menengah muslim terpecah ke dalam banyak kubu sehingga integrasi politik tidak terbangun dengan baik.

Konstruksi politik kelas menengah muslim dibangun diatas fondasi sikap yang “sentimentil” dan iri hati. Kelompok-kelompok kelas menengah muslim tidak berada pada satu koridor strategi yang bisa diusung menjadi sikap bersama. Maka, kelompok-kelompok Islam yang ada justru terjebak untuk saling menjegal satu sama lain (Yudhista, 2017). Kans yang dimiliki ICMI untuk melakukan dinamisasi politik melalui mobilisasi vertikal terlampaui dibaca dengan perspektif politik yang konspiratif yang syarat dengan kepentingan politik sesaat.

Persaingan yang terjadi dalam internal kelompok kelas menengah muslim di era Orde Baru menjadi salah satu penyebab lambatnya akselerasi dan atau evolusi politik umat Islam. Tiap-tiap kelompok ingin menampilkan kekuatan masing-masing (*show force*) dalam membangun narasi politik yang lebih dominan mengalahkan satu sama lain. Misalnya dengan membangun penilaian identitas politik yang bercorak *patron-klien*. Organisasi Fordem dibahasakan sebagai kelompok yang bergulat memperjuangkan kepentingan masyarakat, sementara ICMI dipersepsikan sebagai kelompok yang terlalu bermain di tataran elite politik (Anwar, 2017). Narasi-narasi politik yang menambah dilematis gerakan politik kelas menengah di era orde baru. Realitas yang merepresentasikan tidak adanya soliditas politik dalam internal kelas menengah muslim di Indonesia.

Pada dasarnya, tiap-tiap kelompok kelas menengah muslim yang ada memiliki orientasi politik yang sama yang dilandasi oleh semangat dan cita-cita untuk mensukseskan agenda demokratisasi di Indonesia. Persoalannya terletak pada akses politik. Tidak semua kelompok kelas menengah muslim memiliki akses politik sebagaimana yang dimiliki ICMI. Bentuk lahiriah ICMI dan keleluasaan sepak terjangnya, membuat banyak kelompok menaruh “iri hati” sehingga cenderung mengumbar kritik yang tajam. Terutama ketika melihat bahwa suatu hubungan “mesra” dengan kekuasaan dianggap akan melahirkan hubungan yang tidak kritis.

2. Manuver Politik ICMI: Sebuah Tahapan Demokratisasi

Realitas politik ICMI paling tidak merepresentasikan dua hal; *pertama*, kembali menguatnya *ghiroh* politik Islam dalam panggung politik di Indonesia. *Kedua*,

tersedianya saluran politik alternatif bagi kalangan Islam untuk menyuarakan ide-ide politiknya. Kebijakan orde baru melalui sistem *floating mass* dan fusi kepartaian telah mematikan partisipasi politik umat Islam. Dengan hadirnya ICMI, aspirasi politik umat Islam tidak lagi hanya tersalurkan melalui PPP sebagai satu-satunya saluran politik umat Islam yang disediakan pemerintah orde baru.

Saluran politik (baca; akses politik) merupakan salah satu instrumen pendukung dalam konteks pengembangan demokrasi di suatu negara. Akses politik menentukan kerangka strategi perjuangan. Demokratisasi sebagai jalan untuk menciptakan perubahan sosial di masyarakat tidak selamanya bisa digerakkan dari bawah. Terlebih dalam konteks negara orde baru, dimana kekuasaan dipertahankan dengan strategi yang militeristik dan berpusat pada aktor/individu, bukan supremasi kelas. Maka perubahan harus digerakkan dari atas dengan merombak model kepemimpinan yang ada. Model kepemimpinan yang ideal adalah yang meletakkan supremasi kelas sosial sebagai basis fundamentalnya. Dalam narasi teori sosial, Anthonio Gramsci menjelaskan bahwa supremasi kelas sosial akan dapat ditegakkan melalui dua cara; melalui cara dominasi atau *koersi* (paksaan) dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, 1976: 57-58). Dalam hal ini ICMI memainkan cara yang kedua.

Mobilitas politik ICMI adalah antitesa terhadap model kepemimpinan orde baru yang *koersif* dan kooptatif. Sebagai kelompok terdidik dengan landasan Ilmu Pengetahuan dan moralitas, ICMI tampil dalam panggung politik sebagai perlambangan dari sebuah kekuatan sosial yang oleh Gramsci disebut sebagai *intellectual countre hegemonic*. Intelektual dalam penjelasan Gramsci memiliki tanggungjawab untuk mengorganisir atau mereorganisir kesadaran politik masyarakat secara terus-menerus dalam rangka menciptakan perubahan sosial kearah yang lebih baik. Intelektual *countre hegemonic* bertanggungjawab untuk melepaskan masyarakat dari dominasi dan intervensi kekuasaan.

Supremasi kekuasaan orde baru dilegitimasi melalui kekuatan tiga kelompok; teknokrat, ABRI dan Golkar. Pada era orde baru, Soeharto menyerahkan pengelolaan ekonomi kepada kelompok ekonom lulusan Amerika (*mafia barkeley*) dengan pelaku ekonominya dijalankan oleh mayoritas kelompok Cina. Representasi kekuatan politik berada pada dominasi Golkar di parlemen dan stabilitas keamanan diserahkan kepada kelompok Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat (Anwar, 2017). Ketiga kekuatan tersebut berada pada satu garis komando yang terpusat pada Soeharto. Agenda demokratisasi akan mudah dikembangkan bila terjadi perombakan atas model kepemimpinan yang sudah ada. Yang dilakukan ICMI kemudian adalah mengembangkan mobilisasi politik secara vertikal dengan memanfaatkan akses politik yang tersedia.

Akses politik yang dimiliki ICMI terpatri pada sosok Ketua Umumnya, BJ Habibie yang merupakan “orang penting” dalam pendulum kekuasaan. Habibie merupakan tokoh muslim yang memiliki kedekatan dengan Soeharto. Bahkan oleh sebagian orang menyebutkan Habibie merupakan “anak emas” Soeharto didalam pemerintahan. Maneuver politik ICMI melalui Habibie dilangsungkan dalam tubuh birokrasi dan partai Golkar. Habibie merupakan tokoh yang sangat berperan dalam penyusunan kabinet pembangunan VI dan dalam waktu yang bersamaan Habibie adalah pelaksana tugas harian Ketua Umum Golkar. Satu-satunya partai politik yang “boleh” memenangkan pemilu di era orde baru.

Menjelang Sidang Umum MPR 1993, sejumlah tokoh ICMI dari Golkar dan anak buah Habibie di BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) masuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seperti Sahala Parlin Napitupulu (Wakil Ketua BPPT), Wardiman Djoyonegoro, Marwah Daud Ibrahim, dan Rahadi Ramlan. Sementara dari ICMI diwakili oleh beberapa pengurus terasnya seperti; Watik Pratiknya, Ismail Sunny dan Sucipto Wirosardjono (*Tempo*, 1992: 25).

Susunan Kabinet Pembangunan VI juga dijabat oleh beberapa tokoh dari ICMI. Antara lain; Wardiman Djoyonegoro sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Haryanto Dhanutirto menjabat Menteri Perhubungan, Satrio Budihardjo Joedono menduduki Menteri Perdagangan dan Djamaloeddin Suryo Hadikusumo menjabat Menteri Kehutanan (*Tempo*, 1993: 15).

Dinamisasi politik yang terjadi melalui maneuver politik ICMI memperlihatkan berlangsungnya dua gejala politik paling menentukan dalam sejarah perpolitikan Indonesia di era orde baru. Dua gejala politik itu adalah pertama, adanya proses “islamisasi birokrasi” yang ditandai dengan masuknya serangkaian nama-nama cendekiawan muslim kedalam kabinet birokrasi. Dan yang kedua, yang tak kalah penting adalah menguatnya arus “demiliterisasi politik” melalui penguatan basis sipil dalam pemerintahan. Dua gejala politik yang mengindikasikan telah menguatnya demokratisasi di Indonesia (Yudhista, 2017; Rahardjo, 1995, dalam Fauzi, ed, 1995: 33).

Islamisasi birokrasi dapat dimakni sebagai berlangsungnya “pengintegrasian diri (umat Islam) kedalam negara” (Ali, 1995, dalam Fauzi, ed, 1995: 126). Pertemuan dua kutub kelas sosial (pemerintah orde baru dan cendekiawan muslim) mensyaratkan adanya proses saling memberi dan menerima (*take and give*) diantara keduanya. Interaksi yang terbangun diantara keduanya berjalan dua arah. *Pertama*, melalui mobilitas vertikal politik ICMI membuka keran demokratisasi sehingga memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. *Kedua*, pemerintah tidak lagi melihat umat Islam sebagai “ancaman” terhadap kekuasaan. Pemerintah semakin mendekatkan diri kepada umat Islam melalui ICMI.

Sinergitas keduanya mengarah pada terciptanya keseimbangan baru (politik) di Indonesia. Dinamika sosial politik bergerak ke arah terciptanya hubungan kekuasaan (*power relations*) yang tidak tumpang tindih. Ide tentang Indonesia sebagai negara-bangsa (*nations-state*) adalah ide tentang sebuah masyarakat dan negara modern, dengan ciri utama keadilan, keterbukaan dan demokrasi (Madjid, 1995, dalam Linrung, ed, 1995: 218).

Adanya keseimbangan dalam dinamika politik orde baru bermakna atas terciptanya kondusifitas politik di Indonesia. Demokratisasi yang terjadi telah mengubah wajah hegemoni politik orde baru dari yang semula bersifat hegemoni total (integral hegemoni) menjadi hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). *Decadent hegemony* dalam penjelasan Gramsci adalah keadaan dimana dominasi ekonomi-politik borjuis (dalam hal ini kekuasaan) mendapatkan tantangan. Terdapat potensi disintegrasi didalamnya, dalam arti bahwa meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun “mentalitas” massa tidak sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni.

3. ICMI dan Cita-Cita Demokrasi Komprehensif

Istilah demokrasi komprehensif bukanlah sebuah varian dalam ilmu sosial. Penggunaannya tidak merujuk pada suatu istilah teoritis dalam teori sosial. Demokrasi komprehensif adalah istilah yang dipopulerkan Kuntowijoyo dalam menjelaskan agenda demokratisasi yang dikaitkan dengan perjuangan ICMI sebagai salah satu aktor yang mengambil peran dalam drama demokratisasi di Indonesia.

Demokrasi komprehensif lebih merupakan ambisi politik ICMI untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang tidak saja diperjuangkan hanya dari sisi politik, tetapi dapat menyentuh aspek kehidupan yang lebih luas, dengan merambah dimensi-dimensi lain yang seutuhnya melekat dengan garis kehidupan masyarakat seperti dimensi sosial, budaya, ekonomi dan agama.

Bangunan demokrasi komprehensif yang diusung ICMI bersumber pada dua kaidah agama, yakni; *ta'arruf* dan *syura*'. Kaidah *ta'arruf* sebagaimana tercermin pada QS. Al-Hujarat, ayat: 13 yang dinyatakan telah diakui bangsa-bangsa dan suku-suku, dimana dalam sosiologi modern dikenal sebagai status dan kelas sosial sebagai realitas obyektif. Kaidah *syura*', terdapat dalam QS. As-Syura', ayat: 38 berupa untuk bermusyawarah. Artinya, semua perbedaan yang terjadi antara dua pihak harus diselesaikan dengan jalan musyawarah (Kuntowijoyo, 2001: 87).

Islam kerap dipersepsikan sebagai entitas yang mengajarkan dogma politik *khilafiyah*. Ide khilafah dan demokrasi adalah dua paradigma politik yang berseberangan. Kehadiran ICMI dengan agenda demokratisasi yang meletakkan dasar idenya dari

teks suci al-Qu`an menjadi kenyataan lain yang membuktikan bahwa demokrasi dan Islam adalah dua kekuatan yang tak bisa dipisahkan dalam konteks politik, khususnya di dunia muslim. Seiring dengan hal itu, Almakin menjelaskan bahwa pertanyaan tentang kecocokan antara Islam dan demokrasi adalah pertanyaan yang menyesatkan. Kenyataan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua entitas yang berbeda, namun keduanya tak dapat dipisahkan khususnya dalam konteks politik. Lebih jelas Almakin menjelaskan; *Islam and democracy are two different entities, although both cannot be divorced when dealing with politics in the Muslim world* (Almakin, 2017: 55).

Disisi lain, terdapat perbedaan tentang cara pandang dan cara penerapan tentang konsep politik yang bersumbu pada ajaran agama Islam. Terdapat kelompok yang secara sinis menolak konsep politik modern seperti demokrasi, misalnya HTI yang secara fanatik hanya mengakui ide khilafah sebagai satu-satunya kebenaran yang sepantasnya dianut dalam politik. Terdapat pula kelompok yang menentang secara total ide khilafah karena khilafah digambarkan sebagai sistem politik yang melahirkan diktator-diktator yang berlawanan dengan nilai demokrasi, namun terdapat pula kelompok yang secara lebih moderat seperti ICMI dengan tetap menempatkan ajaran kitab suci al-Qur`an sebagai payung utama dalam membangun narasi dan praktek politiknya. Kenyataan ini membuat Islam menjadi entitas yang sulit diidentifikasi.

Demokrasi komprehensif yang diperjuangkan ICMI dimaksudkan untuk tidak saja mampu menerobos hambatan tapi juga kemampuan untuk meretas jalan. Demokrasi komprehensif dijelaskan secara sederhana melingkupi;

1. Demokrasi Politik, bermakna terciptanya sebuah *civil society* yang kuat dimana ICMI menginginkan adanya peran warga negara yang dominan daripada peranan politisi (*political society*).
2. Demokrasi Sosial, berwujud solidaritas sosial berdasarkan *ukhuwah basyariah*. Budaya sosial yang ada harus dilanjutkan menjadi demokrasi sosial atau jaminan sosial yang sifatnya lebih menyeluruh. Demokrasi sosial adalah bentuk dari *ta`arruf* antara yang kaya dengan yang miskin,
3. Budaya ekonomi, terciptanya budaya ekonomi yang bersifat kekeluargaan (antara individualisme dan kolektivisme). Strukturnya adalah gerakan koperasi. Demokrasi ekonomi adalah pelaksanaan dari konsep *ta`arruf* dan *syura`*.
4. Demokrasi kebudayaan, dalam wujud mengurangi dominasi dikotomis yang menggunakan simbol-simbol kebudayaan oleh yang berstatus lebih tinggi di berbagai bidang kehidupan.
5. Demokrasi agama, ialah dengan menjaga perbedaan dengan saling menghormati atas kepercayaan masing-masing dalam wujud pluralisme agama.

Pengembangan program Lima “K” adalah cerminan dari realisasi atas cita-cita demokrasi komprehensif yang ingin dicapai oleh ICMI. Melalui departemen-departemen yang ada dalam struktur organisasinya, ICMI memberikan peranan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya umat Islam. Secara politik, ICMI bukanlah lembaga atau organisasi politik sehingga tidak memiliki rumusan politik yang baku dan transparan. Demokrasi yang dibangun ICMI adalah demokrasi yang terimplementasi dalam realitas kehidupan masyarakat dengan didasari nilai moral.

ICMI bertujuan membangun sebuah tatanan demokrasi yang positif, dalam arti hadirnya perbaikan pada semua dimensi kehidupan masyarakat. Demokratisasi yang ingin dicapai oleh ICMI bukan semata peningkatan pada kualitas politik (pemerintahan), melainkan mencakup peningkatan terhadap kualitas iman, kualitas fikir, kualitas karya, kualitas kerja dan kualitas hidup. Hingga tumpuan dari demokrasi komprehensif tersebut adalah lahirnya tatanan masyarakat yang berkeadaban (madani) yang sejahtera, adil dan makmur. Bila ICMI dianggap terlalu banyak mengambil bagian dalam dimensi politik, itu dimungkinkan karena dengan terciptanya demokrasi politik akan berdampak positif bagi keberlangsungan demokratisasi dalam bidang yang lain. Demokrasi politik merupakan tahapan pertama menuju demokrasi yang lain.

Cerminan dari spirit kecendekiawanan adalah kemampuan untuk melahirkan *sense of humanity* (rasa kemanusiaan) atas realitas yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Maka melalui berbagai programnya, ICMI membumikan nilai-nilai kecendekiawanan dengan bersentuhan langsung terhadap problematika yang dihadapi masyarakat. Sebagai contoh, di bidang ekonomi misalnya, ICMI mengembangkan program Balai Usaha Mandiri Terpadu (BUMT) yang berasal dari konsep Baitul Mal Wattamwil (BMT). BMT dimaksudkan untuk memacu aktifitas ekonomi masyarakat kelas menengah bawah yang tergolong pengusaha kecil. Realisasinya ke bawah dengan membentuk Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam kurun waktu tiga tahun, ICMI memiliki tidak kurang dari 500 BMT (*Republika*, 1995: 15). Pada skala nasional, ICMI bersama-sama dengan MUI atas bantuan pemerintah, mendirikan Bank Muamalat.

Realisasi program Lima “K” ditempuh juga melalui pembentukan badan-badan otonom. Salah satunya adalah CIDES (*Central for Informastion and Development Studies*). CIDES merupakan *think-thank* (pusat pemikiran) ICMI. Dibawah prakarsa Adi Sasono dan dan Dewi Fortuna Anwar (Hefner, 2001: 73), badan ini melangsungkan agenda penelitian dan menerbitkan sejumlah buku, jurnal Afkar dan menyelenggarakan seminar-seminar nasional maupun internasional (*UMMAT*, 1995: 21).

Disisi lain, yang perlu dicatat dari pelaksanaan program ICMI sebagai agenda demokratisasi adalah pendirian Koran *Republika*. Media massa yang mulai terbit pada

4 Januari 1993 ini dimaksudkan ICMI untuk memimpin dan membimbing opini publik. Koran *Republika* menjadi media yang mentransformasikan kognisi dan nurani masyarakat Islam ke suatu peradaban agamis sebagai penunjang untuk memasuki era globalisasi. Selain Koran *Republika*, ICMI juga menerbitkan media lain dalam bentuk majalah dwi mingguan yang diberi nama majalah *UMMAT* (Bahar, ed, 1995: 168).

Eksistensi ICMI dipertegas melalui penandatanganan prasasti oleh presiden Soeharto pada pembukaan Muktamar II. Dalam sambutannya, Soeharto menyampaikan bahwa ICMI telah mengambil langkah-langkah penting dalam membantu memajukan kehidupan rakyat (*Republika*, 1995: 15). Dengan demikian, perjalanan ICMI dalam kurun waktu satu periode telah banyak terlibat dalam urusan pembangunan nasional, baik yang dilakukan secara struktural maupun kultural dan dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia.

B. Peranan ICMI Bagi Umat Islam Indonesia

Salah satu *raison d'etre* dari kelahiran ICMI dimaksudkan untuk mengangkat citra Islam. Adalah paradoks menemukan kenyataan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun menjadi minoritas dalam peranan sosial-politiknya. Kelompok Islam tentu saja bukan kelompok yang sengaja memilih untuk berdiam diri dan mengedepankan sikap apatis terhadap setiap upaya pembangunan bangsa, namun Islam adalah kelompok yang “terdiamkan” oleh adanya sistem politik yang mengabaikan dan tidak menghendaki kelompok Islam untuk mengambil peranan yang lebih.

ICMI bagi umat Islam adalah “simbolisasi” dari kepercayaan yang menempatkan Islam sebagai kunci menuju sebuah kemajuan. Maka pada prinsipnya ICMI tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman yang diajarkan didalam al-Qur`an dan Hadist. Namun, fakta tersebut tidak lantas menjadikan ICMI sebagai organisasi keagamaan ataupun gerakan keagamaan. Sehingga ICMI tidak memiliki rumusan tentang konsep-konsep yang secara nyata menawarkan nilai-nilai keislaman. Hal tersebut menandakan kehadiran ICMI bukan sebagai organisasi agama maupun organisasi politik yang melakukan kerja-kerja doktriner. Bahkan ICMI tidak berangkat dari ide atau konsep ideal tentang masyarakat Islam yang utopis sekalipun (Supritama, 1995, dalam Qodir dan Iqbal, ed, 1995: 128).

ICMI memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan klasik seputar kosmologi pemikiran keislaman yang bersifat konfrontatif dan imajiner; Islam kultural *vis a vis* Islam moderat, tradisional *vs* non-tradisional, puritan *vs* skular, karena hal tersebut hanya akan membelenggu gerakan Islam pada ranah yang lebih nyata. ICMI mengembangkan simbol-simbol keberislaman sebagai upaya menyelaraskan produk-produk utama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan asas utama Islam, yakni

al-Qur`an dan Hadist (Anwar, 2017). Dari segi ide (pemikiran), ICMI melakukan kontekstualisasi terhadap ajaran Islam sekaligus memberikan pencerahan kepada umat Islam agar mereka dengan keislamannya bisa paralel dengan kemajuan zaman.

Pada akhirnya, ICMI memberikan optimisme yang tinggi kepada umat Islam untuk menunjukkan kiprahnya dalam pentas nasional. Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan dorongan ICMI dan partisipasi penuh dari tiap-tiap kelompok yang ada, khususnya Islam sebagai mayoritas, bisa menjadi negara yang lebih maju dan setara dengan negara-negara lain.

Adakah ICMI masih relevan dengan perkembangan dan pergumulan realitas yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia? Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pasca reformasi ICMI seperti kehilangan peranan dalam panggung politik nasional. Dalam pandangan hemat penulis, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, sebagai organisasi, ICMI terlalu banyak bergantung pada diri seorang BJ. Habibie. Sehingga ketika Habibie tidak lagi berada dalam pusaran kekuasaan, ICMI seperti kehilangan pijakan untuk melangkah. *Kedua*, ICMI mengalami disorientasi. Disorientasi dalam arti bahwa ICMI tidak lagi memiliki orientasi perjuangan yang nyata. Meminjam istilah Cak Nur, ICMI kehilangan orientasi untuk berjuang melawan siapa (*fight again*) dan berjuang untuk siapa (*fight for*). Hal ini dapat disebabkan oleh, *Ketiga*, kelompok kelas menengah muslim telah mendapatkan ruang publik yang dapat dipilih sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi dan artikulasi politiknya, baik melalui Parpol maupun keberadaan LSM-LSM. Reformasi yang melahirkan demokrasi telah memberikan ruang kebebasan bagi setiap kalangan untuk lebih leluasa terlibat dalam urusan bernegara. Pembatasan-pembatasan yang kerap ditemukan di era orde baru tidak lagi menjadi halangan dalam membangun partisipasi politik.

Dengan spirit kecendekiawanan yang melekat pada identitas organisasinya, ICMI masih sangat relevan dengan perkembangan hari ini untuk berbuat sebagaimana yang pernah dilakukannya pada era orde baru untuk melahirkan tidak saja optimisme bagi masyarakat Muslim Indonesia, melainkan kerja-kerja nyata dalam merespons kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

IV. Simpulan

Dinamika politik kelas menengah muslim di era orde baru diwarnai oleh berbagai sikap yang berpengaruh terhadap relasi yang terbangun diantara keduanya. Terdapat tiga model relasi yang berkembang; *Pertama*, tahapan Antagonistik, tumbuhnya hubungan konfrontatif antara Islam yang mengembangkan perjuangan yang ideologis-politis dengan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan dan

menghilangkan acaman konflik ideo-politik dengan cara-cara yang militeristik. *Kedua*, tahapan Resiprokal-Kritis, munculnya sikap saling melunak dan saling memahami. *Ketiga*, tahapan Akomodatif, yaitu sikap saling mengakomodasi satu sama lain, dimana hubungan antara umat dan pemerintah mengarah pada munculnya integrasi dan sinergitas diantara keduanya. Pola hubungan yang terakhir sedikit banyak terjadi karena pengaruh yang diberikan ICMI.

ICMI menginginkan terjadinya demokrasi yang komprehensif. Dalam upaya mencapai itu, ICMI mendukung penguatan *civil society* di Indonesia dan memulai tahapan demokratisasi dari atas. Dalam konteks pembangunan *civil society*, ICMI berperan sebagai; *pertama*, ICMI sebagai Lembaga Perantara antara negara dan masyarakat, agama dan negara dan antara Islam dan non-Islam. *Kedua*, ICMI berposisi sebagai mitra pemerintah (sebagaimana MUI) dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan. Sementara itu, tahapan demokratisasi dimulai dengan menempuh mobilisasi vertikal dengan memasukkan sejumlah tokoh cendekiawan muslim (pengurus dan anggota ICMI) kedalam birokrasi pemerintahan dan partai Golkar. Pada titik ini, ICMI dapat dipandang sebagai akses politik alternatif yang dimiliki umat Islam selain PPP. Dengan begitu, ICMI telah berperan sebagai kelompok *intellectual cointre hegemonic* terhadap kekuasaan orde baru.

Bagi umat Islam Indonesia, ICMI adalah *the creative minority* ditengah anggapan yang mempersepsikan kelompok Islam sebagai *the silent majority*. Simbolisasi-simbolisasi keagamaan yang dikembangkan, secara tidak langsung bertujuan untuk melakukan eksternalisasi nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadaban. ICMI mengembangkan program-program pemberdayaan umat yang direpresentasikan melalui program tunggal peningkatan kualitas Lima “K”; Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya dan Kualitas Fikir. Program Lima “K” diaplikasikan melalui departemen-departemen organisasi dan melalui pembentukan badan-badan otonom seperti CIDES, Gerakan Wakaf Buku, Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orbit hingga pendirian surat kabar seperti Koran Republika. Kesemuanya dimaksudkan guna mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera lahir dan bathin yang di ridhai Allah Subhanahu Wata`ala.

Daftar Pustaka

- Anwar, Syafii. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995
- Bahar, Ahmad (ed). *ICMI, Kekuasaan dan Demokratisasi*. Yogyakarta: PT Pena Cendekia Bangsa, 1995

- Dwipayana, Ari. *Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001
- Fauzi, Nasrullah Ali (ed), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*. Bandung: Mizan, 1995
- Gramsci, Anthonio. *Selections From The Prison Notebooks*. Quantin Hoare and Nowell Smith (ed). New York: Internasional Publisher, 1976
- Hadijaya. (ed). *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Hefner, Robert W. *Civil Islam; Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001
- *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1995
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Juegensmeyer, Mark. *Menentang Negara Skuler, Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*. Bandung: Mizan, 1998
- Kuntowijoyo. *Metode Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan, 1999
- Linrung, Tamasil dkk (ed), *ICMI Beberapa Catatan Kritis*. Jakarta: Amanah Putera Nusantara, 1995
- Makin, Al. *Plurality, Religiosity And Patriotism Critical Insights Into Indonesia and Islam*. Yogyakarta: Suka-Press, 2017
- Maliki, Zainudin. *Rekonstruksi Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Mas`ud, Mochtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999
- Putra, Okrisal Eka, "Hubungan Islam dan Politik Di Era Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, IX, No. 2, Juli-Desember 2008
- Qodir, Zuly dan Lalu M Iqbal (ed), *ICMI, Negara dan Birokratisasi*. Yogyakarta: Study Lingkara, 1995
- Rahardjo, Dawam. *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menenangh dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit LSAf, 1999